

## ABSTRAK

Untuk mengurangi dominasi asing dibidang pertambangan dan memperkuat kedaulatan ekonomi negara, tentunya pemerintah harus membuat suatu kebijakan yang menjamin terlaksananya kedaulatan ekonomi tanpa harus merugikan pihak investor asing. Dari sekian banyak kebijakan yang dibuat oleh pemerintah di bidang investasi, di sektor pertambangan pemerintah membuat suatu kebijakan nasionalisasi melalui kebijakan divestasi dan Participating Interest. Hanya saja perjalanan kebijakan tentang divestasi tidak semuanya berjalan dengan baik. Selain permasalahan finansial, Anggaran yang begitu besar untuk disiapkan, government will juga dipertanyakan dalam pelaksanaan kebijakan ini. Tesis ini membahas tentang bagaimana sebenarnya struktur keuangan pusat dan daerah untuk menjamin pelaksanaan divestasi dan Participating Interest dan struktur kelembagaan keuangan dalam keuangan pusat dan daerah terkait divestasi dan Participating interest.

Penulisan tesis ini terdiri dari 4 (empat) Bab. Bab I tentang Pendahuluan, Bab II tentang membahas Struktur keuangan pusat dan daerah terkait *Participating interest* dan divestasi, Bab III membahas Struktur kelembagaan dalam keuangan pusat dan daerah terkait *participating interest* dan divestasi, dan Bab IV Penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Penelitian tesis menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan Konseptual tentang bagaimana struktur keuangan pusat dan Daerah kaitannya dengan Participating Interest dan divestasi.

Kesimpulannya, secara aturan dan kebijakan hukum dalam keuangan Pusat dan Keuangan Daerah harusny telah mampu mewujudkan nasionalisasi pertambangan melalui divestasi maupun Participating interest. Pengajuan perubahan APBN maupun APBD bisa saja dilakukan. Pusat Investasi Pemerintah maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang pertambangan. Semoga tesis ini bermanfaat untuk perkembangan dan pengayaan kajian hukum di bidang keuangan negara.